

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberhasilan pembangunan nasional dapat dilihat dari meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi nasional dan penurunan jumlah penduduk miskin, kedua indikator tersebut selama ini masih menjadi strategi atau instrument utama dalam rangka menciptakan pembangunan ekonomi yang positif. (Pantjar Simatupang dan Saktyanu K, 2003). Pertumbuhan ekonomi selalu dipengaruhi oleh tingkat pengangguran, dan terjadi baik di negara maju ataupun *emerging countries*. Salah satu penyebab terjadinya pengangguran adalah semakin kecilnya lapangan pekerjaan dan semakin bertambahnya *labor force*, disinilah peran pemerintah dibutuhkan dalam membentuk kesempatan kerja bagi warganya sehingga dapat mengurangi angka pengangguran dan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang positif. (Herbert, 1998).

Pertumbuhan ekonomi daerah tercermin dalam PDRB per kapita (Pratiwi dan Sutrisna, 2014), apabila pertumbuhan PDRB maupun PDRB per kapita tinggi berarti terdapat lebih banyak kesempatan kerja yang lebih baik dan tingkat pendapatan yang lebih tinggi, serta basis pemungutan pajak yang lebih besar sehingga memungkinkan pemerintah untuk dapat berbuat lebih banyak bagi kesejahteraan masyarakat miskin. (Norton, 2002). Tenaga kerja yang terampil dan terdidik menjadi syarat terciptanya pertumbuhan

ekonomi yang positif, dimana berarti kualitas tenaga kerja harus dibekali dengan pendidikan yang layak dan sesuai dengan kebutuhan dunia kerja.

Faktor penentu dalam peningkatan keterampilan tenaga kerja adalah pendidikan, dimana pendidikan berhubungan erat dalam pembangunan karakter, sekaligus menjadi salah satu investasi sumber daya manusia dalam rangka mendapatkan kehidupan yang lebih baik. Seseorang yang mengenyam pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki akses yang lebih besar untuk mendapat pekerjaan dengan bayaran lebih tinggi, dibandingkan dengan individu dengan tingkat pendidikan lebih rendah (Wiguna, 2011)

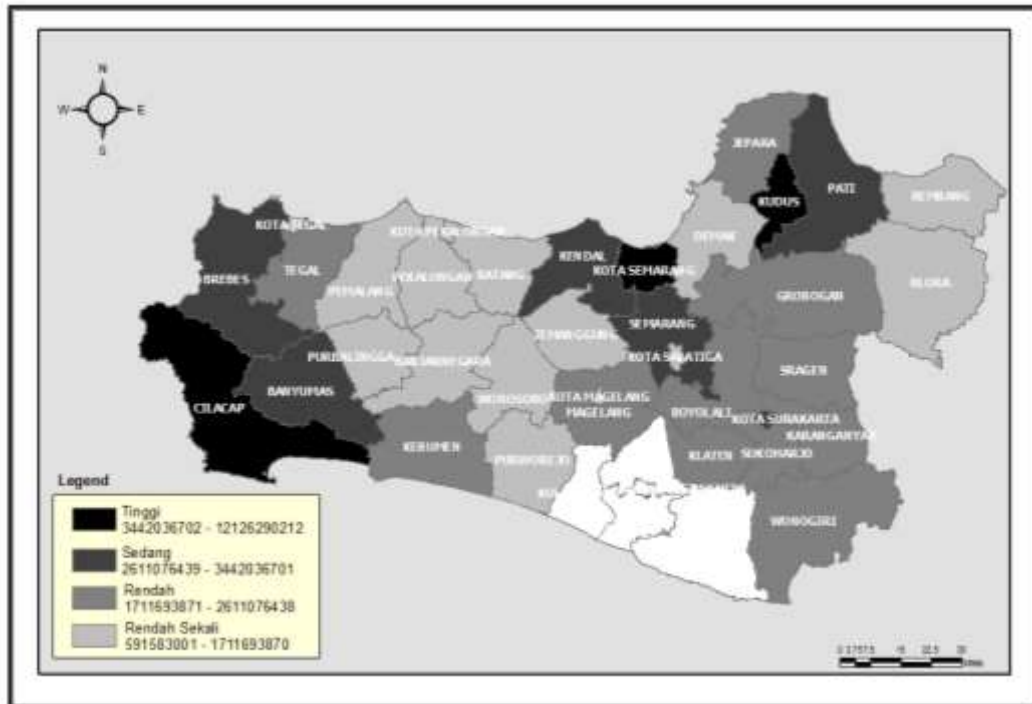
Tabel 1.1
Produk Domestik Regional Bruto menurut Lapangan Usaha
atas Dasar Harga Berlaku di Jawa Tengah
Tahun 2011-2014

TAHUN	JUMLAH PDRB (Jutaan Rupiah)
2011	498.763.824,16
2012	754.529.463,05
2013	832.953.579,11
2014	925.662.692,21

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Tengah 2011-2014.

Sebagaimana data dalam Tabel 1.1 Produk Domestik Regional Bruto menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku di Jawa Tengah dari Tahun 2011-2014 terus mengalami peningkatan, kinerja pembangunan ekonomi di Provinsi menunjukkan bahwa Jawa Tengah berkembang dengan arah pertumbuhna yang positif.

Gambar 1.1
Klasifikasi Produk Domestik Regional Bruto berdasarkan Wilayah
di Jawa Tengah Tahun 2014



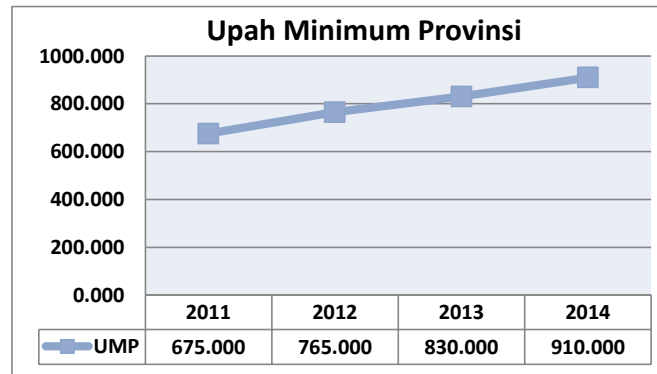
Sumber: Jawa Tengah dalam Angka 2014, Rupa Bumi Jawa Tengah, diolah

Melihat persebaran wilayahnya, pertumbuhan ekonomi yang tinggi dicerminkan dalam pembentukan PDRB, Gambar 1.1 menunjukkan klasifikasi PDRB di Jawa Tengah pada Tahun 2014. Dalam gambar tersebut diketahui bahwa daerah dengan PDRB tertinggi terletak di tiga wilayah yaitu : Kota Semarang, Kudus dan Cilacap, Kota Semarang masih menjadi daerah dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Tengah, hal tersebut mengartikan bahwa peran semarang sebagai core of economic di Jawa Tengah belum tergantikan, PDRB tertinggi kedua adalah Kota Kudus, sektor utama penggerak perekonomian di kudus masih didominasi oleh sektor industry, sedangkan Cilacap merupakan daerah penghasil sumber daya mineral di Jawa Tengah bahkan nasional sehingga pembentukan PDRB di

wilayah ini sangat didominasi dari sektor mineral dan pertambangan. PDRB dengan kategori sedang, terletak di sekitar dearth dengan PDRB tinggi, misalnya Kendal dan Kab Semarang yang berbatasan langsung dengan Kota Semarang, kemudian Pati yang berbatasan langsung dengan Kota Kudus dan Brebes serta Banyumas yang berbatasan langsung dengan Cilacap, hanya Surakarta saja yang letaknya tidak berseberangan.

Permasalahan tenaga kerja yang cukup lama dihadapi oleh Negara Indonesia adalah rendahnya tingkat upah. Upah rendah umumnya terjadi pada sektor-sektor pertanian, industri kecil, dan sektor-sektor informal yang lain, padahal jika dicermati, sektor-sektor inilah yang mampu menyerap tenaga kerja dalam skala besar. Pengupahan sering kali menjadi bahan perdebatan dan bahkan sering kali menjadi pemicu pemogokan buruh. Kebijakan upah minimum juga berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan dan PDRB, gagasan upah minimum yang sudah dimulai dan dikembangkan sejak awal tahun 1970-an bertujuan untuk mengusahakan agar dalam jangka panjang besarnya upah minimum paling sedikit dapat memenuhi Kebutuhan Hidup Minimum (KHM), sehingga diharapkan dapat menjamin tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan hidup beserta keluarga dan sekaligus dapat mendorong peningkatan produktivitas kerja dan kesejahteraan mereka. (Prastyo, 2010)

Gambar 1.2
Grafik Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2011-2014



Sumber: BPS, Jawa Tengah Dalam Angka Berbagai Tahun Terbitan, Diolah

Gambar 1.2 menunjukkan sampai tahun 2014 tingkat upah minimum di Provinsi Jawa Tengah terus mengalami peningkatan disetiap tahunnya. Pada tahun 2011 tingkat upah minimum sebesar Rp. 675.000 kemudian naik menjadi Rp. 765.000 pada tahun 2012 dan Rp. 830.000 di tahun 2013. Kenaikan tertinggi terjadi di tahun 2014 sebesar Rp 910.000.

Teori Solow menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi selalu bersumber dari satu atau lebih dari tiga faktor kenaikan kuantitas dan kualitas tenaga kerja (melalui pertumbuhan jumlah penduduk dan perbaikan pendidikan), penambahan modal dan teknologi. Sedangkan salah satu alat untuk mengukur pembangunan kualitas dan kuantitas tenaga kerja adalah IPM (Todaro, 2003:150). Indek Pembangunan Manusia (IPM) dapat disebut juga dengan HDI, merupakan suatu indeks komposit yang mencakup tiga bidang pembagian manusia yang dianggap sangat mendasar yaitu kesehatan

yang diukur dari rata-rata usia harapan hidup, pengetahuan dan pendidikan yang diukur dari rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf dan standar hidup layak (kesejahteraan). IPM berperan penting dalam pembangunan perekonomian modern sebab pembangunan manusia yang baik akan menjadikan faktor-faktor produksi mampu di maksimalkan.

Tujuan kebijakan ekonomi adalah menciptakan kemakmuran. Salah satu ukuran kemakmuran terpenting adalah pendapatan, dimana kemakmuran akan tercipta karena ada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Pendapatan regional adalah tingkat (besarannya) pendapatan masyarakat pada suatu daerah. Tingkat pendapatan masyarakat dapat diukur dari total pendapatan suatu daerah maupun tingkat pendapatan rata-ratanya. Salah satu ukuran pendapatan suatu daerah adalah PDRB atau Produk Domestik Regional Bruto, yaitu penghitungan seluruh nilai uang dari barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh suatu daerah dalam suatu tahun tertentu. Besaran PDRB tersebut juga dapat menjadi suatu ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi suatu daerah, sehingga suatu daerah dituntut untuk dapat meningkatkan besaran PDRB dari tahun ke tahun. (Suparno, 2012)

Mendasarkan pada latar belakang di atas peneliti tertarik untuk mengetahui peran sektor ketenagakerjaan terhadap pembentukan struktur ekonomi daerah Provinsi Jawa Tengah dengan kajian, sehingga penelitian ini diawali dengan judul “Kontribusi Sektor Ketenagakerjaan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah Provinsi Jawa Tengah”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh sektor ketenagakerjaan yang diwakili oleh UMK, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan Masyarakat Usia Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah yang ditunjukkan dalam PDRB, dalam mencapai tujuan tujuan tersebut peneliti merumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Jawa Tengah
2. Bagaimanakah pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap PDRB di Jawa Tengah?
3. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota terhadap PDRB di Jawa Tengah?
4. Bagaimanakah pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat Usia Kerja Kabupaten/Kota terhadap PDRB di Jawa Tengah?
5. Bagaimanakah pengaruh Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten/ Kota terhadap PDRB di Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian diatas tujuan penelitian ini adalah untuk :

1. Mengetahui kondisi dan potret pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah
2. Mengetahui pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) terhadap PDRB di Jawa Tengah?
3. Mengetahui pengaruh Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota (UMK) terhadap PDRB di Jawa Tengah?

4. Mengetahui pengaruh Tingkat Pendidikan Masyarakat Usia Kerja Kabupaten/Kota terhadap PDRB di Jawa Tengah?
5. Mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Masnusia Kabupaten/Kota terhadap PDRB di Jawa Tengah?

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan kebijakan yang akan ditempuh dalam upaya meningkatkan pertumbuhan PDRB di Provinsi Jawa Tengah.
2. Penelitian ini diharapkan mampu menyajikan informasi dan membuka pengetahuan bagi penelitian selanjutnya.
3. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif bagi peneliti sebagai bahan perbandingan antara teori dan praktek yang sesungguhnya.

E. Metode Analisis

Untuk menganalisis pengaruh sektor ketenagakerjaan yang diwakili oleh UMK, Tingkat Pengangguran Terbuka, Tingkat Pendidikan Masyarakat Usia Kerja, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi daerah Jawa Tengah penelitian ini menggunakan analisis data panel. Data panel adalah gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Data runtut

waktu biasanya meliputi satu objek, tetapi meliputi beberapa periode. Data silang terdiri atas beberapa atau banyak objek dengan beberapa jenis data. Model regresi data panel bisa dirumuskan sebagai berikut. (Winarno,2009:91)

$$\text{PDRB}_{it} = \beta_0 - \beta_1 \text{TPT}_{it} + \beta_2 \text{UMK}_{it} + \beta_3 \text{TingkatPendidikan}_{it} + \beta_4 \text{HDI}_{it} + \mu_{it}$$

Dimana :

PDRB : Produk Domestik Bruto atas dasar harga berlaku

Kabupaten/Kota Jawa Tengah

TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota Jawa Tengah

UMK : Tingkat UMK Kabupaten/Kota Jawa Tengah

TingkatPendidikan : Tingkat Pendidikan Kabupaten/Kota Jawa Tengah

HDI : Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Jawa Tengah

i : Menunjukkan Kota atau Kabupaten

t : Menunjukkan deret waktu 2011-2014

β : Menunjukkan arah dan pengaruh masing-masing variabel

μ : Faktor gangguan atau tidak dapat diamati

F. Sistematika Penulisan

- **Bab I Pendahuluan**

Dalam bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metode analisis serta sistematika penulisan.

- **Bab II Landasan Teori**

Berisi tentang informasi serta teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan, tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya.

- **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisi tentang ruang lingkup penelitian, teknik analisis data, jenis dan sumber data.

- **Bab IV Analisis Data Dan Pembahasan**

Bab ini menguraikan deskripsi pengolahan teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis data panel. Pembahasan dan hasil analisis yang meliputi seberapa besar pengaruh UMK, Tingkat Pengangguran Terbuka dan Tingkat Pendidikan Terhadap PDRB Provinsi Jawa Tengah.

- **Bab V Penutup**

Bab ini berisi membahas tentang kesimpulan dan saran.